

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Menurut Karl D. Jackson dalam Budi Winarno (2008), mengatakan bahwa:

Budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwiyanto dkk dalam Budi Winarno (2008) mengenai kinerja birokrasi di beberapa daerah, bahwa birokrasi publik masih mempersepsikan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai abdi yang bersedia melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para pejabat dan elit politik yang lebih memperjuangkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Dengan menguatnya budaya paternalistik, masyarakat lebih cenderung mengejar status dibandingkan dengan kemakmuran. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoritarianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan *input-input* politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.

Pada kenyataannya yang terjadi bukanlah desentralisasi politik, melainkan lebih pada berpindahnya sentralisme politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis. Hal ini menurut Soetandyo Wignjosebroto dalam Budi Winarno (2008) karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya, namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.

Kondisi yang terjadi pada era orde lama sangatlah berbeda dengan pada era orde baru yang represif. Pada era orde baru, gerakan kaum terpelajar cenderung terpisah dengan gerakan politik. Dalih stabilitas politik melahirkan organisasi-organisasi tunggal yang diakui oleh negara. Di tingkat kampus, pemerintah hanya mengakui Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) sebagai satu-satunya lembaga mahasiswa di tingkat kampus. Kebijakan ini adalah bentuk represi

terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpolitik bagi mahasiswa. Pada saat bersamaan, kebebasan berekspresi bagi mahasiswa hanya diakomodir sebatas pada kegiatan hobisme lewat dibentuknya UKM-UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) (Willy Aditya, 2011).

Buah dari politik tersebut adalah munculnya organisasi-organisasi tandingan dengan label independen. Mereka independen dari kepentingan apapun. Mereka tidak berada dibawah kuasa negara, mereka juga lepas dari kekuatan politik manapun. Dalam lingkungan kampus, muncul kemudian istilah organisasi intra dan ekstra kampus. Yang intra diakui oleh kampus , sementara yang ekstra adalah independen atau berdiri sendiri. Yang intra selalu terpusat pada kegiatan sosial dan kemahasiswaan, sementara yang ekstra terbakar oleh semangat tanpa pemikiran, hingga sering sekali menolak segala yang berhubungan politik praktis. Mereka terjebak dalam gerakan moral yang hanya slogan saja justru sering disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan yang bersembunyi dalam jargon independen tadi.

Kenyataan inilah yang mendasari lahirnya Liga Mahasiswa NasDem sebuah perkumpulan mahasiswa yang menyadari pentingnya menghidupkan kembali gerakan mahasiswa yang tengah mati suri. Gerakan mahasiswa yang berniat merestorasi semangat gerakan pemuda - pelajar dulu, yang sadar bahwa politik adalah alat memajukan peradaban manusia. Inilah takdir sejarah lahirnya gerakan Restorasi Indonesia di ranah mahasiswa. Inilah saatnya kaum terpelajar mengembalikan kewibawaan dan kehormatan politik yang coreng-moreng oleh para bandit dan petualang politik. Kaum terpelajar harus kembali mendekat dan

mengembalikan kehormatan politik Indonesia. Kaum terpelajar harus kembali menjadi produsen utama manusia-manusia politik Indonesia.

Liga Mahasiswa Nasdem bukanlah organisasi mahasiswa yang hanya sibuk dengan dunia kampus atau persoalan akademik belaka. Liga Mahasiswa Nasdem ingin mengembalikan peran intelektual organis mahasiswa untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan rakyat. Liga Mahasiswa Nasdem ingin mencetak kader-kader yang berbakti kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahlian mereka untuk membantu menyelesaikan persoalan rakyat. Liga Mahasiswa Nasdem adalah bagian dari Gerakan Restorasi Indonesia, tulang punggung Partai NasDem untuk bersama-sama memuliakan martabat rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah :

1. Apa motif mahasiswa mengikuti / ikut bergabung dengan Liga Mahasiswa NasDem (LMN)?
2. Bagaimana kaderisasi politik yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa NasDem (LMN)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji motif – motif mahasiswa bergabung dengan Liga Mahasiswa NasDem (LMN).
2. Untuk menganalisa pola kaderisasi yang dilakukan Liga Mahasiswa NasDem (LMN).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sosiologi dalam proses berorganisasi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin mengikuti berorganisasi serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan